

PROSIDING SEMINAR NASIONAL



Strategi Pembangunan
BUDAYA DEMOKRASI

9 APRIL *yang Bermartabat*
2014

Editor :

- Dr. Bambang Kuncoro, M.Si.
- Dr. Ely Triasih Rabayu, M.Hum.
- Dr. Sukarso, M.Si.



**PILIH JANGAN
ASAL
AGAR NANTI TIDAK
MENYAL**

Penerbit :

Universitas Jenderal Soedirman

©2013

dua pilihan: Kita membutuhkan pemimpin yang tegas dan memberi teladan dan/atau kita harus kembali memperkuat Negara sebagai rumah bangsa kita. Dies Natalis FISIP UNSOED menjadikan pemikiran ini sebagai latar belakang membuka ruang curah gagasan melalui seminar nasional bertema: "Strategi Pembangunan Budaya Demokrasi Yang Bermartabat".

Kepada para pembicara kunci, para pemakalah serta seluruh peserta seminar kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya sehingga seminar nasional tersebut bisa terselenggara dengan baik. Secara khusus kepada panitia kami ucapkan selamat atas keberhasilannya menyelenggarakan seminar nasional hingga terwujud dalam bentuk prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembangunan sosial politik di tanah air kita tercinta.

Purwokerto, 25 November 2013
Dekan FISIP UNSOED

Dr. Ali Rokhman, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar Dekan FISIP UNSOED	iii
Daftar Isi	v
Prosiding	
1. Pelayanan Publik Bidang Perpajakan di Kota Surakarta: Tinjauan Terhadap Kualitas Pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah	1
<i>Lestariningsih, Suryatmojo dan Asal Wahyuni Erlin Mulyadi</i>	
2. Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Pendidikan (Studi tentang Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas)	9
<i>Muslih Faozanudin</i>	
3. Strategi Penguatan Skala Ekonomi Daerah Melalui Kegiatan Kerjasama Antar Daerah	24 ✓
<i>Bambang Tri Harsanto</i>	
4. Disorientasi Manajemen Pembangunan Daerah Kepulauan di Propinsi Bangka Belitung	38
<i>Tobirin, Arfianto Purbolaksono dan Juned</i>	
5. Reorientasi Nilai dalam Pembangunan Keluarga (Studi Kasus Penyuluhan Program Keluarga Berencana Berbasis Gender dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga)	50
<i>Lilis SS, Dyah R. Puspita dan Rin Rostikawati</i>	
6. Politik Identitas dan Revitalisasi Demokrasi untuk Kelompok-Kelompok Minoritas	60
<i>Hariyadi</i>	

STRATEGI PENGUATAN SKALA EKONOMI DAERAH MELALUI KEGIATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Bambang Tri Harsanto

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSOED
btriharsanto@yahoo.co.id

ABSTRACT

Regional cooperation is an issue which should be paid attention by the government since its role helps addressing social, political and economical problems as negative impacts from the implementation of regional autonomy. Based on this issue, this study was focused on the role of regional cooperation in addressing economic problems like low scale of economy. Applying the case of Barlingmascakeb as a regional cooperation institution, this study was aimed at analysing whether the policy of regional cooperation formation is an appropriate strategy for strengthening regional scale of economy. This study used game theory and transaction cost in analysing the data. Results of this study showed that the formation of regional cooperation was effective and efficient to improve regional scale of economy.

Keywords: *game theory analysis, regional cooperation, regional scale of economy, transaction cost analysis*

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam melaksanakan pembangunan bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakatnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dilakukan. Dengan otonomi daerah permasalahan pembangunan yang muncul di daerah dapat segera diselesaikan oleh pemerintah daerah tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Karena daerahlah yang sebenarnya lebih memahami terhadap berbagai permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Pada dasarnya pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar pelayanan pembangunan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat lebih cepat dan akurat

dilakukan sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat lebih meningkat. Dalam kenyataannya hasil pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih jauh dari harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data statistik menunjukkan bahwa meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan, namun persentase jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Indonesia sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah tidak mengalami penurunan. (BPS, 2011).

Kegagalan pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh dua hal. Pertama, munculnya **permasalahan sosial politik** sebagai akibat dari eksekusi negatif pelaksanaan otonomi daerah. Seperti dalam banyak kasus, otonomi daerah telah dipersepsikan secara variatif oleh beberapa pemerintah daerah. Diantaranya mereka menganggap bahwa otonomi daerah sebagai momentum untuk memenuhi keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang berdekatan. Akibatnya, muncul beberapa gejala negatif antara lain berkembangnya sentimen primordial, konflik antar daerah, berkembangnya proses KKN, konflik antar penduduk, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, dan munculnya sikap "ego daerah" yang berlebihan (Keban, 2010).

Dalam perspektif sosial politik, kita mengenal batas wilayah administratif sesuai peraturan perundangan, dan batas wilayah fungsional sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif. Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama maka kerjasama antar daerah perlu untuk dilakukan (Keban, 2010).

Kedua, hampir setiap daerah menghadapi **persoalan ekonomi** berupa rendahnya skala ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga setiap daerah menjadi sangat sulit untuk mengembangkan kegiatan perekonomian daerahnya. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperkuat skala ekonomi bagi daerah yang perekonomiannya kecil dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan daerah lain (Brodjonegoro, 2008). Dengan adanya kerjasama antar daerah yang difokuskan pada kerjasama dalam bidang pengembangan ekonomi maka masing-masing daerah diharapkan dapat saling bersinergi dalam meningkatkan skala ekonomi daerahnya. Dengan bekerjasama nilai keekonomian suatu bidang kegiatan akan dapat ditingkatkan sehingga hasilnya akan dapat lebih menguntungkan. Di samping itu, dengan bekerjasama efisiensi pembiayaan akan dapat ditingkatkan karena biaya operasional suatu kegiatan akan menjadi beban semua daerah yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk mengetahui apakah adanya kerjasama antar daerah dapat menjadi solusi bagi upaya penguatan skala ekonomi daerah. Dalam rangka untuk mengetahui hal tersebut penelitian ini kemudian dilakukan.

Dengan mengambil kasus pada lembaga kerjasama antar daerah BARLINGMASCAKEB, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembentukan kerjasama antar daerah sebagai strategi penguatan skala ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lima kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang tergabung di dalam lembaga kerjasama antar daerah BARLINGMASCAKEB yaitu: Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam.

Untuk mendapatkan data primer yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari responden dengan cara *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan memilih responden yang dianggap memahami terhadap permasalahan yang diteliti. Mereka adalah para pengusaha, anggota Dewan Eksekutif dan Regional Manager BARLINGMASCAKEB, aparat pemerintah daerah pada Dinas Perdagangan, Pariwisata, Penanaman Modal dan Investasi, Bappeda., Tenaga Kerja, Energi dan Sumberdaya Mineral serta pakar di bidang otonomi daerah. Adapun metode analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah kebijakan pembentukan lembaga kerjasama antar daerah merupakan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan skala ekonomi daerah dilakukan dengan menggunakan analisis *game theory* (*game theory analysis*) (Anwar, 2002), dan analisis-biaya transaksi (Yustika, 2008).

Game theory menganalisis interaksi sosial manusia dengan menggunakan suatu model strategi permainan. Model ini memakai analisis matematika untuk membantu memahami pilihan strategi yang perlu diambil oleh setiap pemain. (Nachrowi, 2007). Analisis *game theory* digunakan untuk mengetahui apakah dalam meningkatkan skala ekonomi daerah akan lebih menguntungkan apabila dicapai melalui kerjasama antar daerah atau tanpa bekerjasama antar daerah. Analisis dilakukan dengan menghitung nilai *payoff* dari masing-masing kabupaten dalam aktivitas peningkatan skala ekonomi daerah. *Payoff* adalah penalti yang harus ditanggung atau *reward* yang diperoleh masing-masing aktor atau pelaku dalam analisis permainan tersebut. Secara sederhana interaksi para pemain (lima kabupaten) dalam meningkatkan skala ekonomi daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks *Payoff* Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah

Pemain/ Strategi		EMPAT KABUPATEN	
		Bekerjasama (J = 1)	Tidak Bekerjasama (J = 2)
KABUPATEN (A,B,C,D atau E)	Bekerjasama (i = 1)	X_{11}, Y_{11}	X_{12}, Y_{12}
	Tidak Bekerjasama (i = 2)	X_{21}, Y_{21}	X_{22}, Y_{22}

Keterangan:

X_{ij} = *Pay off* kabupaten yang dianalisis jika mengambil strategi ke-i dan empat kabupaten lainnya mengambil strategi ke-j.

Y_{ij} = *Pay off* empat kabupaten lainnya jika mengambil strategi ke-j dan kabupaten yang dianalisis mengambil strategi ke-i.

Ada dua strategi yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan skala ekonomi daerah, yaitu strategi: (1) tidak bekerjasama; atau (2) bekerjasama. Apabila tidak bekerjasama maka masing-masing pemerintah daerah akan bekerja sendiri dan akan menanggung seluruh biaya yang harus dikeluarkan dalam upaya meningkatkan skala ekonomi daerah masing-masing berupa belanja langsung dari kegiatan pengembangan pariwisata, perdagangan, ketenagakerjaan, pertambangan dan investasi. Sebaliknya masing-masing daerah juga akan memperoleh penerimaan sebagai akibat dari pengembangan dari berbagai bidang tersebut dalam bentuk retribusi pariwisata, PDRB perdagangan, pendapatan tenaga kerja, penerimaan pajak pertambangan daerah dan nilai investasi yang masuk ke daerah.

Apabila memilih bekerjasama berarti masing-masing pemerintah daerah harus bersedia saling membantu dalam upaya meningkatkan skala ekonomi daerah. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh masing-masing daerah apabila mereka bersedia

untuk bekerjasama adalah adanya tambahan biaya yang harus dikeluarkan berupa iuran bersama untuk kegiatan promosi potensi ekonomi daerah secara bersama. Namun demikian, mereka juga akan menerima keuntungan berupa berkurangnya biaya transaksi sebagai akibat dari adanya kerjasama antar daerah. Di samping itu, akibat dari adanya sinergi dari kerjasama antar daerah maka pendapatan dari masing-masing daerah dalam bentuk retribusi pariwisata, PDRB perdagangan, pendapatan tenaga kerja, penerimaan pajak pertambangan daerah dan nilai investasi yang masuk ke daerah juga akan meningkat.

Untuk mengukur efisien tidaknya desain kelembagaan kerjasama antar daerah dalam upaya meningkatkan skala ekonomi daerah digunakan alat analisis ekonomi biaya transaksi (*transaction cost economics*). Hipotesis dari analisis ini adalah semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi (transaksi), berarti kian tidak efisien kelembagaan yang didesain; demikian sebaliknya (Yustika, 2008). Atas dasar asumsi tersebut, untuk menguji efisien tidaknya desain kelembagaan kerjasama antar daerah BARLINGMASCAKEB dilakukan dengan mengukur keberadaan indikator dari variabel biaya transaksi pada aktivitas peningkatan skala ekonomi daerah sebelum program dan sesudah program sebagai berikut:

Tabel 2. Aktivitas Biaya Transaksi Pada Kegiatan Peningkatan Skala Ekonomi Daerah

No.	Aktivitas Ekonomi	Biaya Transaksi
1.	Fasilitasi Investasi Daerah	1. Biaya pembuatan rencana kegiatan 2. Biaya promosi potensi daerah 3. Biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perijinan 4. Biaya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
2.	Kegiatan Ketenagakerjaan	1. Biaya pembuatan rencana kegiatan 2. Biaya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 3. Biaya yang dikeluarkan untuk mengakses informasi lowongan pekerjaan

No.	Aktivitas Ekonomi	Biaya Transaksi
3.	Kegiatan Pengembangan Pariwisata	1. Biaya promosi wisata 2. Biaya pembuatan rencana kegiatan 3. Biaya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
4.	Kegiatan Pengelolaan Pertambangan	1. Biaya promosi pengelolaan tambang 2. Biaya pembuatan rencana kegiatan 3. Biaya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Game Theory

Berdasarkan hasil analisis *game theory* yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam meningkatkan skala ekonomi daerah akan lebih menguntungkan apabila dicapai melalui kerjasama antar daerah atau tanpa bekerjasama antar daerah, diperoleh nilai *payoff* dari masing-masing kabupaten dalam aktivitas meningkatkan skala ekonomi daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Matriks *Payoff Game* Interaksi Masing-Masing Kabupaten Dengan Empat Kabupaten Lain Dalam Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah

Pemain/ Strategi	Empat Kabupaten	
	Bekerjasama (Milyar Rp.)	Tidak Bekerjasama (Milyar Rp.)
Bnj.Negara Bekerjasama	148,336 ; 832,682	133,831 ; 754,174
Bnj.Negara Tidak Bekerjasama	133,831 ; 754,174	133,831 ; 754,174
Pb.Lingga Bekerjasama	74,631 ; 906,386	67,478 ; 820,527
Pb.Lingga Tidak Bekerjasama	67,478 ; 820,527	67,478 ; 820,527
Banyumas Bekerjasama	226,850 ; 754,167	205,236 ; 682,769
Banyumas Tidak Bekerjasama	205,236 ; 682,769	205,236 ; 682,769
Cilacap Bekerjasama	291,273 ; 689,745	263,972 ; 624,033
Cilacap Tidak Bekerjasama	263,972 ; 624,033	263,972 ; 624,033
Kebumen Bekerjasama	239,926 ; 741,092	217,486 ; 670,520
Kebumen Tidak Bekerjasama	217,486 ; 670,520	217,486 ; 670,520

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Banjarnegara apabila bekerjasama dengan empat kabupaten yang lain akan mendapatkan nilai *payoff* sebesar 148,336 milyar rupiah sedangkan apabila tidak bekerjasama hanya mendapatkan nilai *payoff* sebesar 133,831 milyar rupiah. Untuk Kabupaten Purbalingga apabila bekerjasama dengan empat kabupaten yang lain akan mendapatkan nilai *payoff* sebesar 74,631 milyar rupiah sedangkan apabila tidak bekerjasama hanya mendapatkan *payoff* sebesar 67,478 milyar rupiah. Kabupaten Banyumas apabila mau bekerjasama akan mendapatkan nilai *payoff* sebesar 226,850 milyar rupiah dan apabila tidak mau bekerjasama hanya mendapatkan nilai *payoff* sebesar 205,236 milyar rupiah. Bagi Kabupaten Cilacap apabila mau bekerjasama dengan empat kabupaten yang lain akan mendapat keuntungan sebesar 291,273 milyar rupiah sedangkan kalau tidak bekerjasama hanya akan mendapatkan keuntungan sebesar 263,972 milyar rupiah. Sedangkan bagi Kabupaten Kebumen apabila mau bekerjasama dengan empat kabupaten yang lain akan mendapatkan manfaat sebesar 239,926 milyar rupiah namun apabila tidak bekerjasama hanya akan mendapatkan keuntungan sebesar 217,486 milyar rupiah.

Hasil tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa bekerjasama adalah strategi terbaik yang harus dipilih oleh masing-masing kabupaten apabila ingin meningkatkan skala ekonomi daerah. Hasil ini memberikan implikasi bahwa egoisme antar daerah dan semangat berkompetisi antar daerah sebagai eksese dari pelaksanaan otonomi daerah harus dihilangkan. Sebagai gantinya perlu ditumbuhkan adanya semangat berkolaborasi antar daerah dan adanya kemauan untuk bekerjasama dalam memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi daerah yang terbatas untuk kepentingan bersama.

2. Analisis Biaya Transaksi

Dari hasil analisis biaya transaksi yang dilakukan untuk mengukur efisiensi kelembagaan kerjasama antar daerah dalam meningkatkan skala ekonomi daerah menunjukkan bahwa dengan adanya lembaga kerjasama antar daerah dapat menurunkan biaya transaksi pada kegiatan peningkatan skala ekonomi daerah.

Beberapa tabel berikut secara ringkas menggambarkan hasil analisis biaya transaksi dalam aktivitas meningkatkan skala ekonomi daerah sebelum dan sesudah adanya lembaga kerjasama antar daerah.

Pada program yang berkaitan dengan fasilitasi investasi daerah ada tiga kegiatan yang berpeluang menimbulkan biaya transaksi yaitu kegiatan promosi potensi daerah, pembuatan rencana program dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya transaksi telah terjadi pada tiga kegiatan tersebut baik sebelum adanya kerjasama antar daerah maupun sesudah adanya kerjasama antara daerah sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4. Biaya Transaksi Promosi Potensi Daerah untuk Mendatangkan Investasi

Kabupaten	Rata-Rata Sebelum Program (Rupiah)	Rata-Rata Sesudah Program (Rupiah)
Banjarnegara	237.500.000	100.000.000
Purbalingga	56.660.000	20.000.000
Banyumas	409.851.250	201.666.667
Cilacap	333.800.000	198.333.333
Kebumen	187.500.000	75.000.000

Sumber: Data sekunder diolah.

Tabel 5. Biaya Transaksi Pembuatan Rencana Program Mendatangkan Investasi di Daerah.

Kabupaten	Rata-Rata Sebelum Program (Rupiah)	Rata-Rata Sesudah Program (Rupiah)
Banjarnegara	0	0
Purbalingga	10.612.000	5.000.000
Banyumas	0	0
Cilacap	0	0
Kebumen	0	0

Sumber: Data sekunder diolah.

Tabel 6. Biaya Transaksi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mendatangkan Investasi di Daerah.

Kabupaten	Rata-Rata Sebelum Program (Rupiah)	Rata-Rata Sesudah Program (Rupiah)
Banjarnegara	4.000.000	0
Purbalingga	5.000.000	0
Banyumas	2.000.000	0
Cilacap	80.000.000	41.666.667
Kebumen	32.500.000	0

Sumber: Data sekunder diolah.

Namun demikian, data di atas menunjukkan bahwa meskipun biaya transaksi tetap muncul dalam berbagai kegiatan program fasilitas investasi di daerah, tetapi dengan adanya kerjasama antar daerah dapat mengurangi biaya transaksi yang terjadi dalam program fasilitasi investasi daerah.

Pada aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program ketenagakerjaan, biaya transaksi yang berpeluang muncul terjadi pada kegiatan pembuatan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi serta aktivitas masyarakat dalam mengakses informasi lowongan tenaga kerja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa biaya transaksi hanya terjadi pada pembuatan rencana kegiatan dan aktivitas monitoring dan evaluasi program ketenagakerjaan sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 7. Biaya Transaksi Pembuatan Rencana Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan

Kabupaten	Rata-Rata Sebelum Program (Rupiah)	Rata-Rata Sesudah Program (Rupiah)
Banjarnegara	0	0
Purbalingga	6.000.000	5.000.000
Banyumas	0	0
Cilacap	0	0
Kebumen	0	0

Sumber: Data sekunder diolah.

Tabel 8. Biaya Transaksi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan.

Kabupaten	Rata-Rata Sebelum Program (Rupiah)	Rata-Rata Sesudah Program (Rupiah)
Banjarnegara	0	0
Purbalingga	2.500.000	2.500.000
Banyumas	0	0
Cilacap	0	0
Kebumen	0	0

Sumber: Data sekunder diolah.

Meskipun pada penyelenggaraan program ketenagakerjaan masih menimbulkan adanya biaya transaksi baik pada kondisi sebelum adanya kerjasama antar daerah maupun sesudah adanya kerjasama antara daerah, namun secara spesifik hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga sedangkan di ke empat kabupaten lainnya tidak terjadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di Kabupaten Purbalingga untuk kegiatan pembuatan rencana program terjadi penurunan biaya transaksi setelah dilakukan kegiatan kerjasama antar daerah.

Pada program kegiatan pengelolaan pertambangan biaya transaksi berpeluang terjadi pada kegiatan pembuatan rencana kerja, promosi potensi tambang dan kegiatan monitoring dan evaluasi program. Namun demikian, data menunjukkan biaya transaksi hanya muncul pada kegiatan monitoring dan evaluasi sedangkan pada kegiatan pembuatan rencana kerja dan promosi potensi tambang tidak terjadi adanya biaya transaksi. Tabel berikut menggambarkan besarnya biaya transaksi pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pertambangan di wilayah Barlingmascakeb.

Tabel 9. Biaya Transaksi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Pertambangan

Kabupaten	Rata-Rata Sebelum Program (Rupiah)	Rata-Rata Sesudah Program (Rupiah)
Banjarnegara	0	0
Purbalingga	45.000.000	26.666.667
Banyumas	32.500.000	24.000.000
Cilacap	30.000.000	30.000.000
Kebumen	0	0

Sumber: Data sekunder diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun biaya transaksi tetap terjadi pada kegiatan monitoring dan evaluasi, namun dengan adanya kerjasama antara daerah, kegiatan tersebut dapat menekan terjadinya biaya transaksi pada aktivitas pengelolaan pertambangan di kabupaten anggota.

Pada program kegiatan pengembangan pariwisata, biaya transaksi dapat muncul dalam berbagai kegiatan seperti pada aktivitas pembuatan rencana kegiatan, kegiatan promosi wisata serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun, dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa biaya transaksi ditemukan pada kegiatan promosi wisata dan pembuatan rencana kerja sedangkan pada kegiatan monev tidak muncul adanya biaya transaksi. Tabel berikut menggambarkan besarnya biaya transaksi pada kegiatan tersebut.

Tabel 10. Biaya Transaksi Kegiatan Promosi Potensi Pariwisata

Kabupaten	Rata-Rata Sebelum Program (Rupiah)	Rata-Rata Sesudah Program (Rupiah)
Banjarnegara	17.500.000	0
Purbalingga	40.000.000	13.283.667
Banyumas	77.161.000	75.000.000
Cilacap	670.000.000	322.583.333
Kebumen	436.986.000	163.216.469

Sumber: Data sekunder diolah.

Tabel 11. Biaya Transaksi Pembuatan Rencana Kegiatan Pengembangan Pariwisata

Kabupaten	Rata-Rata Sebelum Program (Rupiah)	Rata-Rata Sesudah Program (Rupiah)
Banjarnegara	125.000.000	66.666.667
Purbalingga	0	0
Banyumas	24.806.400	0
Cilacap	0	0
Kebumen	18.750.000	13.333.333

Sumber: Data sekunder diolah.

Namun demikian, meskipun masih terjadi adanya biaya transaksi dalam kegiatan pengembangan pariwisata, adanya kerjasama antar daerah dapat menekan terjadinya biaya transaksi yang lebih besar. Berdasarkan fakta-fakta tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa biaya transaksi masih ada pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan skala ekonomi daerah, namun setelah adanya kegiatan kerjasama antar daerah berbagai biaya transaksi tersebut dapat dikurangi. Dengan demikian, dari aspek kelembagaan keberadaan lembaga kerjasama antar daerah efisien karena dapat mengurangi biaya transaksi yang timbul dari kegiatan peningkatan skala ekonomi daerah.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis *game* dan analisis biaya transaksi di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan lembaga kerjasama antar daerah merupakan **strategi yang tepat** bagi upaya peningkatan skala ekonomi daerah. Hasil ini memberikan implikasi bahwa egoisme antar daerah dan semangat berkompetisi antar daerah sebagai eksekusi dari pelaksanaan otonomi daerah harus dihilangkan. Sebagai gantinya perlu ditumbuhkan adanya semangat berkolaborasi antar daerah dan adanya kemauan untuk bekerjasama dalam memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi daerah yang terbatas untuk kepentingan bersama. Namun demikian, untuk dapat mencapai hal tersebut dibutuhkan adanya komitmen dari kepala daerah untuk senantiasa menyediakan dukungan penyediaan berbagai sumber pendanaan bagi keberlangsungan lembaga kerjasama ini dalam menjalankan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Affendi, 2002, *Teori Permainan (Game Theory) Dan Aplikasinya Dalam Analisis Ekonomi Dan Kelembagaan*, Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. Tidak dipublikasikan.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2011, Berita Resmi Statistik No. 72/11/Th. XIV, 7 November 2011, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2011

Brodjonegoro, Bambang P.S., 2008, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Ekonomi*, Harian Kompas, Jakarta.

Keban, Y.T., 2010, *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk Dan Prinsip*. <http://www.google.co.id/search?q=kerjasam%20antar%20pemerintah%20daerah&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np>,

di download tanggal 15 desember 2010

Nachrowi, Nachrowi, D. 2007, *Peranan Matematika Ekonomi dan Ekonometrika dalam memahami Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI, Jakarta.

Yustika, Ahmad Erani, 2008, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, Bayumedia Publishing, Malang.